BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan laporan keuangan adalah suatu tindakan ilegal, yang dilakukan dengan cara mengubah atau menyembunyikan informasi yang bersifat material (Mulia & Tanusdjaja, 2021). Fadhilah, et al. (2022) berpendapat bahwa, tindakan penipuan pada laporan keuangan dapat mengurangi kredibilatas laporan keuangan dan merugikan seluruh anggota perusahaan maupun pihak ketiga. Menurut SAS No.99 dalam penelitian Larum, et al. (2021) ada beberapa cara untuk melakukan tindakan penipuan laporan keuangan yaitu, (1) mengubah, memanipulasi, memalsukan informasi akuntansi dan data pendukung dengan penyajian laporan keuangan, (2) memalsukan atau mengubah dengan disengaja pada transaksi, informasi atau kejadian yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan, (3) penyelewengan peraturan yang dilakukan secara sengaja berhubungan dengan klasifikasi, jumlah, penyajian atau tata cara pengungkapan.

Laporan keuangan adalah tolak ukur/ barometer untuk memperkirakan baik buruknya kondisi kinerja perusahaan dengan memaparkan seluruh aktivitas operasional perusahaan, hingga semua data perusahaan (Putra & Kusnoegroho, 2021). Pentingnya laporan keuangan membuat perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan laporan keuangan demi mencukupi kebutuhan dan keinginan penggunanya, serta membangun citra perusahaan yang baik.

Terkadang hal tersebut justru akan menciptakan celah bagi perusahaan untuk melakukan kejahatan seperti kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) (Fadhilah *et al.*, 2022).



Sumber: ACFE Report to The Nations (2018, 2020, 2022). Diolah penulis, 2023

Gambar 1.1

Fraud Report to The Nations



Sumber: ACFE Survei Fraud Indonesia (2019). Diolah penulis, 2023

Gambar 1.2 Hasil Survei *Fraud* di Indonesia

Hasil survei ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Report to The Nations menyatakan pada tahun 2018, 2020, 2022 penipuan yang paling umum didapati di berbagai negara yaitu, penyalahgunaan asset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Menurut penilaian dari jumlah kasus yang terjadi, kasus kecurangan laporan keuangan berada di urutan terakhir. Namun, kasus kecurangan laporan keuangan adalah salah satu kecurangan yang sangat merugikan dan berbanding terbalik dengan kasus kecurangan lainnya. Kerugian pada tahun 2020, kasus kecurangan laporan keuangan mengalami kenaikan 19,25% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2022, kerugian yang dialami mengalami penurunan 38%. Walaupun pada tahun 2022 kasus kecurangan laporan keuangan mengalami penurunan, nilai kerugian yang dicapai masih tergolong tinggi dari kasus penipuan lainnya. Berdasarkan ACFE Association of

Certified Fraud Examiners Indonesia (2019) kasus kecurangan yang sangat merugikan di Indonesia yaitu, kasus korupsi dengan jumah Rp373.650.000.000, kemudian disusul dengan penyalahgunaan aset dengan jumlah Rp257.520.000.000 dan kecurangan laporan keuangan dengan jumlah Rp242.260.000.000. Walaupun nilai kerugian kasus kecurangan laporan keuangan lebih sedikit, jumlah kerugiannya tidak jauh berbeda dengan kasus lainnya.

Bestari (2023) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merancang proyek pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di wilayah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) di lima provinsi, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Tujuan proyek tersebut adalah untuk menyediakan layanan digital bagi masyarakat di wilayah tersebut. Proyek BLU BAKTI menargetkan pembangungan dalam 2 fase selama 2 tahun. Tahun 2021 pembangunan pertama 4.200 tower, pembangungan kedua 3.700 tower ditahun berikutnya. Namun kenyataannya, hingga April 2022 pengerjaan proyek tersebut hanya 86% yang terealisasikan dari targetnya. Catatan yang dimiliki Kominfo pun menyatakan bahwa hanya 1.900 lokasi yang terealisasikan dari target 4.200 desa selama fase 1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan kerugian negara lebih dari Rp8

triliun. Kerugian tersebut terjadi karena adanya peningkatan harga, pembayaran BTS yang belum terbangun, dan biaya penyusunan kajian hukum.

Rachman (2023) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan masalah yang ada pada laporan keuangan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) mengenai pengadaan BTS 4G yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Hasil dari pemeriksaan ikhtisar semester I tahun 2023 menyatakan, hanya laporan keuangan Kominfo tahun 2022 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara itu, 80 lembaga/ kementerian lainnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WDP yang diberikan BPK kepada Kominfo diakibatkan adanya permasalahan dalam penyajian aset tetap, yaitu mesin dan peralatan hasil pengadaan BTS 4G sebesar Rp3,88 triliun yang belum dapat diyakini kewajarannya. Permasalahan tersebut juga berhubungan dengan konstruksi dan pengerjaan hasil pengadaan BTS 4G sebesar Rp1,93 triliun yang tidak dapat dipastikan kewajarannya, dikarenakan tidak diikuti dengan dokumen yang memadai.

Indikasi awal seseorang melakukan tindakan penipuan, yaitu pelaku merasa adanya tekanan, pelaku melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan, dan pelaku merasa tindakan kecurangan yang dilakukan bukan lah hal yang salah (Mardianto & Tiono, 2019). Hal tersebut sejalan dengan teori Cressey (1953) pada penelitian Rahma & Suryani (2019) mengatakan bahwa,

Kecurangan laporan keuangan terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut terdiri dari 3 elemen, yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) atau sering dikenal fraud triangle theory. Penelitian ini akan menggunakan teori fraud triangle dalam mendeteksi kecurangan laporan keungan. Elemen tekanan (pressure) akan di representasikan dengan variabel tekanan eksternal (external pressure), peluang (opportunity) akan direpresentasikan dengan variabel keadaan suatu perusahaan (nature of industry), dan rasionalisasi (rationalization) akan direpresentasikan dengan variabel total akrual.

Penelitian ini menggunakan tekanan eksternal untuk mempresentasikan elemen tekanan/ pressure pada fraud triangle theory. Tekanan eksternal menurut penelitian Agustina & Pratomo (2019); Ozcelik (2020); Putra & Kusnoegroho (2021); Larum, et al. (2021); Irmawati & Nawirah (2022); Deliana, et al. (2022) mengungkapkan tekanan eksternal yang dihitung dengan rasio leverage berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan, dikarenakan pihak ketiga atau kreditur melakukan elaborasi tersendiri atau mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memberikan persetujuan peminjaman pada perusahaan. Situasi tersebut menunjukan bahwa pihak ketiga atau kreditur cenderung akan melakukan pengecekan kondisi perusahaan secara ketat (Larum et al., 2021).

Namun, bertentangan dengan hasil penelitian Puspitaningrum, et al. (2019); Fitri, et al. (2019); Budiyono & Arum (2020); Omukaga (2020); Dewi (2021); Nugroho & Handayani (2022) yang mengungkapkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki hutang dalam jumlah yang besar cenderung melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan. Hal itu menunjukan bahwa situasi keuangan perusahaan sedang tidak baik dan berefek negatif pada perusahaan dalam mengajukan pinjaman yang maksimal. keadaan tersebut memberikan perusahaan tekanan eksternal dan mendorong perusahaan untuk melakukan upaya apapun dalam mengurangi beban hutang serta menampilkan kinerja laporan keuangan yang baik (Budiyono & Arum, 2020).

Penelitian ini menggunakan keadaan suatu perusahaan untuk mempresentasikan elemen kesempatan pada *fraud triangle theory*. Keadaan suatu perusahaan menurut penelitian Suparmini, *et al.* (2020); Fitriana, *et al.* (2021); Kurniawati (2021) menyatakan, keadaan suatu perusahaan yang diukur menggunakan rasio perubahan piutang berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Semakin besar rasio perubahan piutang, semakin sedikit peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Keadaan tersebut dapat dijabarkan bahwa biasanya perusahaan yang mengeluarkan penjualan secara kredit bertujuan untuk memperbanyak nilai laba, penjualan dan persaingan dengan perusahaan lain. Jika memang perubahan piutang tinggi, auditor mampu

memperkirakan salah saji material pada akun piutang dengan melakukan validasi besar piutang pada pihak ketiga/ klien (Kurniawati, 2021). Namun, berbanding terbalik dengan hasil penelitian Siddiq & Suseno (2019); Nurbaiti & Suatkab (2019); Omukaga (2020); Mulia & Tanusdjaja (2021); Dewi (2021) yang menyatakan bahwa keadaan suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Subjektivitas dalam memperkirakan piutang tak tertagih dapat menjadi celah/ peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Peluang tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah piutang tak tertagih, walaupun adanya kesulitan dalam menagihkan piutang tersebut. Disimpulkannya bahwa semakin besar nilai piutang perusahaan, semakin besar pula peluang risiko kecurangan laporan keuangan (Nurbaiti & Suatkab, 2019).

Penelitian menggunakan rasionalisasi pada elemen *fraud triangle theory*. Rasionalisasi menurut hasil penelitian Budiyono & Arum (2020); Mulia & Tanusdjaja (2021); Kurniawati (2021); Dewi (2021); Muariya, *et al.* (2022) menyatakan rasionalisasi yang dihitung dengan total aset akrual berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Aktivitas perusahaan secara keseluruhan dapat digambarkan dari nilai total akrual perusahaan. Penentuan tingkat akrual perusahaan bergantung pada kebijakan spesifik yang ditetapkan dan diinterpretasikan oleh manajemen. Manajemen laba akrual memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi pendapatan dengan mencatat trankasi terjadi,

meskipun belum adanya pengurangan atau penambahan kas. Keadaan tersebut berhubungan dengan konsep discretionary accruals. Tujuan manajemen melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh pendapatan yang diinginkan (Kurniawati, 2021). Oleh sebab itu, nilai rasio total akrual yang tinggi akan meningkatkan peluang manajemen untuk melakukan pemanipulasian laporan keuangan (Mulia & Tanusdjaja, 2021). Sedangkan, hasil penelitian Permatasari & Laila (2021); Mukaromah & Budiwitjaksono (2021) yang menyatakan bahwa rasionalisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi merupakan elemen yang tergolong susah untuk diidentifikasikan perhitungannya. Alasannya yaitu, rasionalisasi berhubungan dengan sikap atau perbuatan karyawan, manajemen, serta dewan komisaris yang dianggap benar. Umumnya juga rasioanalisasi berhubungan dengan intergritas manajemen. Kadang kala saat integritas manajemen tinggi, manajemen akan berperilaku jujur dan menghindari kecurangan (Permatasari & Laila, 2021).

Gender Chief Financial Officer (CFO) juga merupakan satu dari beberapa variabel yang dapat mengukur kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keungan. Luo, et al. (2020) menyatakan bahwa, presentase CFO perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan CFO laki-laki terhadap kemungkinannya melakukan kecurangan laporan keuangan atau dapat dijelaskan CFO perempuan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal itu dapat didasari bahwa perempuan lebih cenderung berperilaku etis dan menjauhi risiko

yang mungkin akan terjadi dibandingkan dengan laki-laki (Luo *et al.*, 2020). Serupa dengan hasil penelitian Maulidi, *et al.* (2022) di mana CFO perempuan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal itu beralasan bahwa CFO perempuan lebih bertindak konservatif ketika melakukan pelaporan keuangan dari pada CFO laki-laki.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Menurut CNN Indonesia (2023) Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menyatakan telah memberikan hukuman kepada pegawai Kemenkeu yang terlibat dengan fraud atau kecurangan. Hal tersebut berasal dari hasil 3 tahun laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Tahun 2020, ada sebanyak 128 kasus fraud dan sebanyak 71 pegawai sudah ditindak lanjuti dan didisiplinkan. Tahun 2021 terjadinya peningkatan, yaitu 174 kasus kecurangan dan sebanyak 114 mendapatkan hukuman disiplin. Tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 185 kasus kecurangan dan 96 pegawai dijatuhkan hukuman disiplin. Kemudian pada tahun 2023, Firli Bahuri sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan adanya 33 laporan hasil analisis (LHA) terkait dengan adanya transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nilai transaksi pada LHA PPATK tersebut lebih dari Rp25 triliun. Fakta kasus kecurangan yang terjadi di Kementerian Keuangan Indonesia berada di bawah pimpinan Sri Mulyani. Di mana Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan Indonesia yang memiliki identitas sebagai seorang perempuan

Berlandasan dari penjelasan latar belakang di atas, adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian dan variabel gender CFO sebagai research Gap. Penulis belum menemukan adanya penelitian yang menggunakan gender CFO sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara tekanan eksternal, keadaan suatu perusahaan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka penulis menjadikan variabel gender CFO sebagai novelty penelitian. Hal ini dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu yang mengidentifikasi adanya hubungan antara gender CFO sebagai variabel independen terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sehingga penelitian ini ingin menguji apakah variabel gender CFO dapat memoderasi hubungan antara tekanan eksternal, keadaan suatu perusahaan, dan rasionali<mark>sasi sebagai variabel independen terhadap kecurang</mark>an laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menetapkan periode penelitian pada periode tahun 2020-2022. Sehingga, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Gender CFO Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Di Sektor Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022)".

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

- 1. Terjadinya inkonsistensi atau ketidakseragaman dari hasil penelitian terdahulu.
- 2. Terdapat indikasi pengaruh variabel tekanan eksternal, keadaan suatu perusahaan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.
- 3. Adanya indikasi variabel *gender* CFO sebagai moderasi terhadap tekanan eksternal, keadaan suatu perusahaan, dan rasionalisasi sebagai variabel independen terhadap kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pembahasan terfokus serta tidak mengambang. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sasaran penelitian yang meliputi kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur yang tercatat di BEI periode tahun 2020-2022.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitan ini antara lain:

- 1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022?
- 2. Apakah keadaan suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022?
- 3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022?
- 4. Apakah *gender* CFO memoderasi hubungan tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022?
- 5. Apakah *gender* CFO memoderasi hubungan keadaan suatu perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022?
- 6. Apakah *gender* CFO memoderasi hubungan rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh variabel tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh variabel keadaan suatu perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh variabel rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana *gender* CFO memoderasi hubungan variabel tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022.
- 5. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana gender CFO memoderasi hubungan variabel keadaan suatu perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022.
- 6. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana *gender* CFO memoderasi hubungan variabel rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor perusahaan infrastruktur periode 2020-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengalaman, wawasan dan pengimplementasian ilmu yang tidak didapatkan di pendidikan perkuliahan terutama di bidang Akuntansi yang berhubungan dengan tekanan ekskernal, keadaan suatu perusahaan dan rasionasilasi terhadap kecurangan laporan keuangan dan *gender* CFO sebagai pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan sumber tambahan dan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut untuk penyelesaian tugas akhir
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa dan beragam variabel yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan.